

---

## **Peran Institut Kapal Perempuan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berperspektif Keadilan Gender Di Indonesia**

**Monika Nur Wijayanti**

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, 55183

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 55183

Email : [monikanurwijayanti@gmail.com](mailto:monikanurwijayanti@gmail.com)

### **Abstract**

*This thesis describes the efforts of the women's movement in Indonesia Institut KAPAL Perempuan in combating the actions of gender inequity and efforts to protecting women's human rights. Human rights are basically one of the basic rights that every individual has as a human being regardless of the differences between men or women. However, often women get different treatment related to human rights. Giving different treatment to men and women regarding human rights is discrimination. The discrimination is one of the global issue that fight by every country. Therefore, the Institut KAPAL Perempuan fight to deal the discrimination by conducting the advocacy. The process of advocasies start from givinng critical education, women's schools, and social protection programs provided by the government. In this case, the author explains the efforts of the Institut KAPAL Perempuan to realize women who can solve discrimination problems independently without having to wait for help from other parties. Furthermore, the data on this research is secondary data from books, website, and other sources. The author, by conducting this study, is also conducted an interview with the Institut KAPAL Perempuan directly.*

**Keywords : KAPAL Perempuan, women movement, women's rights**

### **Abstrak**

Penelitian ini menggambarkan tentang upaya gerakan perempuan yaitu Institut KAPAL Indonesia untuk memperjuangkan tindakan kesetaraan gender dan upaya melindungi hak asasi perempuan. Hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak setiap individu sebagai manusia baik perempuan maupun laki-laki. Namun, seringkali perempuan mendapatkan perlakuan berbeda terkait hak asasi manusia. Memberi perlakuan yang berbeda terkait hak asasi manusia antar perempuan dan laki-laki adalah suatu tindak diskriminasi. Diskriminasi adalah salah satu masalah global yang diperjuangkan oleh setiap negara. Karena itu, Institut KAPAL Perempuan berusaha memerangi diskriminasi dengan melakukan advokasi. Proses advokasi yang dilakukan dimulai pendidikan kritis, sekolah perempuan, dan menanggapi program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, penulis mengatakan bahwa upaya dari Institut KAPAL Perempuan yaitu untuk merealisasikan perempuan yang dapat menyelesaikan masalah diskriminasi tanpa harus menunggu bantuan dari pihak lain. Selanjutnya, data pada penelitian ini adalah data dari buku, situs web, dan sumber lainnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Institut KAPAL Perempuan secara langsung untuk mendapatkan berbagai informasi serta data terkait.

**Kata kunci : Institut KAPAL Perempuan, Gerakan Perempuan, Hak Asasi Perempuan**

---

---

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak dasar yang melekat serta dimiliki seseorang yang keberadaannya dipandang sebagai manusia. Pada dasarnya hak asasi manusia ini tidak membedakan atas kepemilikan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun sayangnya, dalam kasus domestik maupun internasional hak asasi manusia seringkali tumpang tindih, khususnya terjadi perbedaan terkait hak asasi manusia terhadap perempuan.

Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis umum PBB bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki hak atas setiap perlindungan hukum yang sama baik laki-laki ataupun perempuan tanpa adanya perbedaan diantara keduanya atau diskriminasi. Semua memiliki hak yang sama atas setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi hak-hak asasi manusia (OHCHR, t.thn.).

Dalam dunia internasional, terdapat instrumen yang sangat mendasar terkait hak-hak asasi yang dimiliki oleh perempuan yang disebut dengan *Convention of the Elimination of all the forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (Valentana, 2015). CEDAW adalah konvensi yang dilahirkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa untuk mendukung kesetaraan hak-hak yang dimiliki perempuan. Selain sering mengalami ketidaksetaraan, perempuan juga seringkali menjadi korban dalam kekerasan seksual. Hal tersebut dikarenakan adanya pemikiran bahwa pria adalah satu-satunya pemegang kontrol. Segala bentuk aspek seperti ekonomi, sosial, politik, bahkan psikologi tergantung pada pria. Sehingga perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat dan diletakkan dalam posisi inferior atau subordinat. Bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap perempuan yang sejatinya sebagai manusia dapat dikatakan sebagai hak yang inheren dan tidak dapat dipisahkan (Handayani, 2016). Hal tersebut menjadikan posisi perempuan sebagai makhluk yang kurang bermartabat. Perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan yang khusus dalam kepemilikan hak-hak yang mereka terima di dalam hidup bermasyarakat juga berbangsa. Seringkali dalam suatu keadaan, perempuan selalu dijadikan yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan adanya tindak ketidakadilan terhadap perempuan akhirnya munculah suatu inisiatif bagi para perempuan untuk berusaha menegakkan hak dan keadilan bagi mereka sebagai manusia. Gerakan perempuan muncul atas kejadian-kejadian sosial di lingkungan sekitar. Gerakan perempuan mengadopsi dari feminisme yang mana mereka berupaya bersama-sama untuk menyuarkan hak para perempuan yang tertindas dan terdiskriminasi. Hubungan aktivis yang penuh dengan gagasan feminisme dalam beberapa hal merupakan hasil dari kekuatan patriarki; segala perjuangan yang dilakukan hanya untuk perubahan sosial, bukan untuk kepentingan suatu kelompok saja. Selain itu, sejarawan feminis mengatakan bahwa perempuan dari beragam lokasi sosial dapat mengalami perjuangan gerakan yang sama dengan sangat berbeda. Pada awalnya gerakan perempuan muncul untuk menyuarkan diskriminasi atas perempuan kulit hitam yang menentang perilaku patriarkal oleh para pemimpin hak-hak sipil. Kemudian para perempuan pekerja kasar dan berupah rendah berusaha untuk menentang bentuk diskriminasi bersama para feminisme yang didominasi oleh perempuan kelas menengah dan kebawah dalam menyuarkan keadilan (Lurence, 2014).

Salah satu bentuk gerakan perempuan yang aktif dalam menyuarkan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan adalah Institut KAPAL Perempuan. Institut KAPAL Perempuan berdiri di Indonesia sejak tahun 2000, keberadaannya muncul tepat ketika Hari Perempuan Internasional yaitu pada tanggal 8 Maret. KAPAL Perempuan merupakan kependekan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan. Disingkat KAPAL karena mereka menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan kapal merupakan media transportasi yang menghubungkan antar pulau. Penggunaan kata lingkaran mengandung spirit, tidak ada pusat, dan menggambarkan siklus aksi refleksi (KAPAL Perempuan, n.d.). Tujuan dari pembentukan institut ini adalah demi mewujudkan keadilan sosial serta keadilan gender dengan membentuk suatu gerakan sosial dan gerakan perempuan. Dengan dukungan MAMPU atau kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Institut KAPAL Perempuan dan para mitranya membantu perempuan untuk mendapatkan akses serta mempengaruhi pelaksanaan program-program perlindungan sosial pemerintah melalui Gender Watch dan Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan yang merupakan suatu wadah informal bagi perempuan memberikan pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas untuk menciptakan pemimpin perempuan lokal agar dapat mengadvokasi terjadinya perubahan (MAMPU, 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif untuk melakukan dan memenuhi data dengan teknik *library research*, *media research*, serta analisis data. Selain itu penulis juga melakukan teknik pengumpulan data serta informasi dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Institut KAPAL Perempuan.

## **KERANGKA TEORITIK**

Dalam Teori merupakan suatu upaya untuk menjawab suatu pertanyaan mengapa dari sebuah rumusan masalah (Mas'ood, 1994). Selain menggunakan teori, bisa juga menggunakan konsep ataupun model. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Model Advokasi Segitiga koordinasi.

Pada dasarnya Gerakan Perempuan merupakan salah satu bentuk dari organisasi non pemerintah. Organisasi non pemerintah yang kerap kali disebut NGO adalah suatu organisasi yang bergerak serta dibentuk oleh kalangan sendiri dan bebas dari campur tangan pemerintah. Organisasi ini tidak menggantungkan diri kepada pemerintah terutama dalam hal sarana serta prasarana dan juga finansial. Namun tidak sepenuhnya mereka terlepas dari hubungannya antar pemerintah negara karna tak jarang pula negara memberikan bantuan kepada mereka. Dalam kasusnya, NGO seringkali bergerak dibidang sosial, membantu menyuarakan ketidakadilan yang jarang terdengar. Praktek NGO seringkali berupaya membuat perubahan kebijakan yang mana hasilnya dapat membantu masyarakat. Tidak jarang advokasi digunakan sebagai salah satu cara yang seringkali ditempuh oleh NGO dalam menanggapi suatu kasus.

Advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat (Ronodirjo & Sjahid).. Advokasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut (Azizah, 2014).

Tujuan kegiatan advokasi, khususnya dalam rangka pembentukan pendapat umum dan penggalangan massa, bukan semata-mata membuat orang 'sekedar tahu' tapi juga 'mau terlibat dan bertindak. Jelasnya, advokasi bukan sekedar mempengaruhi 'isi kepala' orang banyak, tetapi juga 'isi hati' orang banyak. Advokasi bukan sekedar mengubah kognisi (pengetahuan,

wawasan) seseorang, tetapi juga mempengaruhi afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap dan perilaku) orang banyak. Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Kegiatan advokasi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melibatkan berbagai pihak/organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga kordinasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Model Segitiga Advokasi oleh Nur Azizah dalam *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014

Tampak dalam bagan di atas yaitu Model Advokasi Segitiga Koordinasi, bahwa kegiatan advokasi memerlukan banyak pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Advokasi memang sejatinya melibatkan banyak pihak atau aktor (kelompok-kelompok aksi) yang bertindak sebagai penggagas gerakan advokasi. Pihak-pihak tersebut bertugas untuk melakukan mobilisasi massa, pihak yang bertindak sebagai penyedia data, pihak yang bertindak sebagai penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legislasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang akan membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi. Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh Gerakan Perempuan Institut KAPAL Perempuan dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berperspektif keadilan gender di Indonesia juga banyak pihak yang bergerak dan tersusun secara terorganisir dan sistematis serta saling berhubungan sesuai dengan yang digambarkan dalam Model Advokasi Segitiga Koordinasi tersebut. Banyaknya aktor dan pihak yang terlibat merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan suatu kebijakan publik melalui tindak advokasi yang

dilakukan untuk membantu para perempuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender dan mewujudkan terbentuknya hak-hak asasi manusia yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Gerakan perempuan bekerjasama dengan berbagai kalangan berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang dan memperlakukan para perempuan supaya dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat, bahwasannya tindak diskriminasi adalah salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mendapatkan simpati serta dukungan publik sebagai basis massa yang dilakukan oleh gerakan perempuan supaya selanjutnya upaya advokasi dapat berjalan. Tujuan dari advokasi para gerakan perempuan Institut KAPAL Perempuan adalah dalam upayanya untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berperspektif keadilan gender di Indonesia. Terlebih lagi yang diharapkan dari Institut KAPAL Perempuan adalah agar terciptanya kesadaran yang tinggi oleh para perempuan Indonesia agar kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang menyangkut tentang terancamnya hak-hak asasi manusia terhadap perempuan.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **Upaya Advokasi Oleh Institut Kapal Perempuan Dalam Mewujudkan Ham Berperspektif Keadilan Gender**

#### **A. Menanamkan Sadar Pendidikan Kritis**

Sesuai dengan visi dan misi yang dipegang oleh KAPAL Perempuan bahwa visinya adalah untuk dapat terciptanya suatu masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang kuat untuk mempercepat tercipta dan terbentuknya suatu masyarakat yang dapat memiliki daya pikir kritis, solidaritas yang tinggi, penegakkan keadilan gender, transparan atau tidak ada yang perlu ditutupi serta anti kekerasan baik itu kepada sesama atau siapapun. Pendidikan kritis Pada poin pertama dikatakan bahwa misi utamanya adalah untuk mengembangkan pendidikan yang kritis terhadap masyarakat, kelompok sosial, atau bahkan para perempuan yang dimarginalkan dengan dasar pemikiran feminis supaya dapat lebih kritis lagi memandang berbagai isu yang tengah terjadi di masyarakat, khususnya isu yang marak merugikan para perempuan sehingga diharapkan dengan adanya pembelajaran tersebut maka dapat mengambil langkah yang tepat dan dapat keluar dari orientasi masalah yang kerap kali menodong hak-hak para perempuan. Dengan dibangunnya pondasi pemikiran yang kritis kepada para perempuan Indonesia maka dapat membentuk adanya kesadaran yang dibangun atas dasar pemahaman, serta pengalaman perempuan terkait kebenaran, keadilan, pengetahuan dan kekuasaan. Berbicara dengan

penyebaran pengetahuan feminisme maka dapat juga diartikan dengan berbicara mengenai suatu ideologi. Paham feminisme berkaitan dengan bentuk perlawanan untuk membebaskan diri dari penindasan, dominasi serta ketidakadilan. Bentuk perlawanan atas suatu penindasan biasanya dengan berbagai macam aksi. Tetapi hal terpenting yang perlu ditanamkan sebelum itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran yang kritis. Dengan mata, hati dan tindakan yaitu bahwa dia menyadari kemudian melihat hingga mengalami adanya penindasan yang terjadi pada perempuan dan mempertanyakannya serta menggugat dan mengambil aksi untuk merubah kondisi tersebut. Dengan adanya pendidikan kritis maka hal-hal yang diharapkan adalah tumbuhnya pemberdayaan juga upaya pembebasan dalam mewujudkan terbentuknya perubahan sosial serta struktur masyarakat yang lebih adil juga demokratis. Upaya mewujudkan perubahan sosial dari pendidikan kritis yakni supaya masyarakat sosial dapat memahami serta terhindar dari penindasan serta eksploitasi. Sedangkan tujuan minimal dari pelaksanaan sekolah kritis adalah supaya dapat tercipta ruang dalam lingkungan masyarakat untuk dapat lebih memahami system dan struktur keadilan, selain itu juga diharapkan dapat melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju system sosial yang lebih adil bagi siapapun di dalamnya (Muthoharoh, 2008).

Pendidikan kritis yang diusung oleh KAPAL Perempuan menjadikan para aktivis, anggota dewan, wanita buruh juga pemerintah sebagai sasarannya. Sejak awal didirikan, KAPAL Perempuan memiliki concern atau fokus utama pada masalah-masalah perempuan, pendidikan alternatif, dan pendidikan kritis serta pluralism. Dalam proses pelaksanaannya, KAPAL selalu berusaha untuk mengcover ketiga hal tersebut supaya dapat terlaksana dengan baik. Pendidikan kritis yang diusung oleh KAPAL Perempuan juga melibatkan anak-anak sekolah menengah atau bahkan anak-anak sekolah pertama. Dalam dunia pendidikan, menanamkan edukasi sejak dini adalah hal yang sangat tepat, sehingga sekolah kritis tidak memandang batasan usia dalam pelaksanaannya. Dikarenakan kejahatan gender yang sering terjadi hingga saat ini bukan hanya menyerang para perempuan diusia remaja atau keatas saja, tetapi anak-anak juga ikut menjadi sasaran karena dianggap sebagai kelompok yang paling rentan baik dari sisi pemahaman maupun perlawanan diri. Kehadiran KAPAL untuk mendorong sadar pemikiran kritis terhadap anak-anak, supaya mereka menyadari bahwa bahaya laten seperti pernikahan dibawah umur nyata adanya dan dapat menyerang mereka. Bukan hanya itu, tetapi juga diharapkan para anak-anak ikut memiliki perasaan empati terhadap teman mereka diusia sebaya yang berada di daerah-daerah terpencil ataupun yang kurang beruntung dari segi pendidikan sehingga harus mengalami putus sekolah. Para anak-anak sekolah pertama yang

berada di kota dan umumnya memiliki privilese lebih terutama dalam dunia pendidikan diajak untuk melakukan kunjungan supaya mereka dapat melihat keadaan nyata yang sebenarnya. Bahwa masih banyak anak dengan usia seperti mereka yang berada di desa dengan privilese minim bahkan untuk pendidikan saja mereka susah mendapatkan haknya, sehingga pada akhirnya banyak dari mereka dinikahkan dalam kondisi usia dini. Atau bahkan banyak anak-anak yang putus sekolah terpaksa harus hidup di jalanan atau ikut bekerja bersama orangtua mereka. Dengan membangun kesadaran kritis akhirnya para anak-anak paham bahwa tidak semua yang mereka nikmati dan lihat di kota sama seperti apa yang terjadi di pelosok negeri. Anak-anak pun ikut mengkampanyekan terkait betapa pentingnya sekolah dan betapa bahayanya menikah dalam usia dini kepada teman-teman sebayanya. Terlebih lagi dengan melihat realita yang ada, mereka turut berempati dan membantu teman-temannya yang berada di pelosok negeri dengan cara memberi buku supaya membantu membangun kesadaran mereka juga dapat menjadi panduan dalam belajar diluar pendidikan formal.

Terkait kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual juga termasuk ke dalam program peningkatan paham kritis yang disusung oleh KAPAL Perempuan. Kekerasan dan pelecehan seksual seringkali dialami oleh para perempuan di semua kalangan. Namun kelompok yang memiliki intensitas tinggi menerima kekerasan serta pelecehan adalah para Pekerja Rumah Tangga perempuan. Para PRT biasanya melakukan pekerjaan rumah baik itu di tingkat domestik maupun yang memilih sebagai migrant. PRT domestik merupakan salah satu pekerjaan umum yang dapat dilakukan para perempuan yang berada di wilayah miskin kota. Akibat minimnya skill, banyaknya keperluan rumah tangga, minimnya pendidikan, bahkan tidak adanya jejak pendidikan yang pernah dienyam menjadikan mereka harus memilih pekerjaan tersebut. Upah yang diterima juga tidak seberapa dibandingkan dengan banyaknya tenaga yang mereka keluarkan selama bekerja. Belum lagi resiko akan kekerasan yang dilakukan oleh para majikannya ketika mereka tidak melakukan hal yang sesuai seperti yang diharapkan para majikan. Dengan keadaan yang seperti itu, KAPAL berusaha hadir untuk memberikan materi bagaimana cara mereka menghindari hal-hal tersebut. Untuk dapat menuntut hak, maka harus dilakukan kewajiban terlebih dulu, maka dari itu dihimbau untuk para PRT melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Pekerjaan yang baik maka akan menjadikan mereka minim penindasan. Kemudian juga dengan adanya membangun pemikiran kritis disini para PRT diajari bagaimana cara menuntut gaji mereka sesuai dengan yang telah dijanjikan. Apabila terjadi pelecehan ataupun kekerasan, para PRT dihimbau untuk tidak



bungkam melainkan melaporkan kepada pihak yang sekiranya dapat membantu mereka. Dengan pemikiran yang kritis maka menjadikan pemikiran yang terbuka pula, sehingga mereka tidak selalu dirundung rasa takut lantaran status sosial anatra PRT dengan majikan. Sehingga apabila para majikan melakukan hal yang salah atau tidak memberikan hak PRT dengan sesuai, maka PRT wajib menuntut hak tersebut.

## **B. Sekolah Perempuan**

KAPAL Perempuan bersama mitra kerjanya yaitu MAMPU atau Kemitraan Indonesia-Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membentuk Sekolah Perempuan yang diinisiasi oleh Lingkar Pendidikan Alternatif. Dalam upaya membangun kesejahteraan hidup yang merata antara perempuan dan laki-laki perlu adanya membangun responsif gender melalui pendidikan alternatif. Adanya konstruksi yang melekat dalam budaya Indonesia seringkali mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki posisi sebagai ibu rumah tangga dan terbatas aktivitas domestiknya, sehingga membuat pendidikan perempuan menjadi tidak terlalu diperhatikan. Hal tersebut seakan menjadikan ruang gerak bagi perempuan sangat terbatas dan segala sesuatu yang berhubungan dengan diluar lingkungan rumah menjadi tabu. Akibatnya kualitas hidup yang dialami para perempuan menjadi sangat rendah. Dengan adanya pendidikan yang rendah maka hal tersebut akan merambat ke banyak aspek lain seperti, kemiskinan para perempuan yang begitu tinggi bahkan lebih tinggi dibanding kemiskinan para laki-laki. Kemiskinan memicu kepada arah tingginya angka buta aksara dan pernikahan dibawah umur (Lestari, 2017).

Pendidikan alternatif untuk perempuan menjadi sangat penting karena beberapa faktor gender menjadikan akses perempuan di dalam dunia pendidikan sangatlah rendah. Tingkatan buta huruf yang dialami oleh perempuan di berbagai wilayah di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi bahkan jika dibandingkan dengan tingkatan buta huruf yang dialami oleh laki-laki. Kemudian, pendidikan alternatif dikatakan penting karena kurikulum di Indonesia yang masih bias gender bahkan hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan para perempuan terus mengalami kerugian dengan berbagai gambaran serta stereotip tersebut. Selain itu juga pendidikan formal Indonesia saat ini belum banyak mendatangkan jawaban atas berbagai kebutuhan perempuan. Misalnya pemahaman akan hak-hak reproduksi perempuan dan hak untuk terbebas dari berbagai permasalahan kekerasan yang berbasis gender (Jurnal Perempuan, 2005). Salah satu bentuk pendidikan alternatif yang kini tengah dilaksanakan adalah model pendidikan yang menanamkan perspektif feminisme didalamnya. Secara luas feminisme

diartikan sebagai adanya kesadaran tentang ketertindasan perempuan dan aksi membebaskan perempuan dari ketertindasannya. Dengan demikian pendidikan berspektif feminisme pada dasarnya adalah sebuah usaha untuk mengembangkan suatu perspektif yang jelas tentang keadilan sosial dan keadilan gender (Muchtar & Missiyah, 2016). Sehingga atas dasar permasalahan yang tengah dihadapi oleh para perempuan Indonesia tersebut maka akhirnya KAPAL Perempuan mendirikan beberapa sekolah perempuan yang telah terbentuk dan terlaksanakan di beberapa kota di Indonesia diantaranya adalah:

1. Sekolah Perempuan Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur, NTB  
Sekolah Perempuan Desa Montong Betok, kabupaten Lombok Timur, memiliki 5 Kelompok Belajar Perempuan dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 236 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan 26 orang.
2. Sekolah Perempuan Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT  
Sekolah Perempuan Desa Noelbaki, kabupaten Kupang, NTT memiliki 5 Kelompok Belajar Perempuan dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 170 orang 17 orang anggota Sekolah Perempuan tingkat Kelurahan berjumlah 17 orang.
3. Sekolah Perempuan Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, DKI Jakarta  
Sekolah Perempuan kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, DKI Jakarta memiliki 9 Kelompok Belajar Perempuan tingkat RW dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 363 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan berjumlah 13 orang.
4. Sekolah Perempuan Desa Mattiro Baji, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan  
Sekolah Perempuan Desa Mattiro Baji, kabupaten Pangkajene Kepulauan memiliki 3 Kelompok Belajar Perempuan dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 83 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan berjumlah 23 orang.
5. Sekolah Perempuan Desa Sumber Gede, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sekolah Perempuan Desa Sumber Gede, kabupaten Gresik, Jawa Timur memiliki 5 Kelompok Belajar Perempuan dengan anggota Sekolah Perempuan berjumlah 198 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan berjumlah 20 orang.

6. Sekolah Perempuan Kelurahan Tarantang, Kota Padang, Sumatera Barat

Sekolah Perempuan Kelurahan Tarantang, Kota Padang memiliki 7 Kelompok Belajar Perempuan dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 198 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat Kelurahan berjumlah 35 orang.

7. Sekolah Perempuan Desa Ketapang Raya, Kabupaten Lombok Timur, NTB

Sekolah Perempuan Desa Ketapang Raya, kabupaten Lombok Timur, NTB memiliki 4 Kelompok Belajar Perempuan dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 140 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan berjumlah 21 orang.

8. Sekolah Perempuan Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, NTT

Sekolah Perempuan Desa Mata Air, kabupaten Kupang, NTT memiliki 3 Kelompok Belajar Perempuan dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 107 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat Kelurahan berjumlah 18 orang,

9. Sekolah Perempuan Rawajati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Sekolah Perempuan Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, DKI Jakarta memiliki 2 Kelompok Belajar Perempuan tingkat RW dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan 759 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan berjumlah 68 orang.

10. Sekolah Perempuan Desa Tenige, Kabupaten Lombok Utara, NTB

Sekolah Perempuan Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara, NTB memiliki 5 Kelompok Belajar Perempuan dengan jumlah anggota Sekolah Perempuan berjumlah 191 orang dan anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan berjumlah 23 orang (Institut KAPAL Perempuan, n.d.).

Pembentukan Sekolah Perempuan yang diinisiasi oleh Lingkar Pendidikan Alternatif merupakan suatu program bersama yang dibangun dengan MAMPU, yaitu suatu lembaga kemitraan Australia-Indonesia dalam Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Di tahun 2018, KAPAL bersama rekannya MAMPU baru saja mendirikan sekolah perempuan di Gresik. Telah diluncurkan beberapa sekolah perempuan yang tersebar di 10 desa di Kabupaten Gresik, Jawa timur. Sekolah Perempuan yang didirikan untuk memperingati hari Kartini ini merupakan sebuah replikasi dari Sekolah Perempuan yang telah didirikan terlebih dahulu oleh KAPAL Perempuan bersama MAMPU di tahun 2014. Keberlangsungan dari berdirinya hingga berjalannya program Sekolah Perempuan tak luput dari pemantauan pemerintah setempat. Dengan adanya Sekolah Perempuan maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang tengah dialami oleh para perempuan diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, tingginya angka pernikahan anak, rendahnya upah pekerja perempuan, kepemilikan dokumen legal dan keikutsertaan perempuan dalam program perlindungan sosial pemerintah, kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan perempuan (Dhina, 2018). Sehingga dengan adanya sekolah perempuan sendiri dapat mempermudah untuk memantau apa saja permasalahan yang tengah terjadi dan dialami oleh para perempuan sehingga nantinya dapat dicari jalan keluar dari permasalahan tersebut bersama-sama. Selain itu pembentukan karakter kepemimpinan perempuan serta sadar lingkungan terkait apa saja yang perlu diketahui tentang hak-hak perempuan dapat tertuang dengan mudah berkat fasilitas sekolah perempuan.

Untuk mendukung keberlangsungan dari sekolah perempuan, KAPAL dan MAMPU juga mengadakan evaluasi kinerja organisasi di dalamnya dengan menggunakan OCPAT atau Organizational Capacity and Performance Assessment Tools. Evaluasi yang digunakan merupakan sebuah metode sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas serta kemampuan satu organisasi melalui proses pembelajaran juga bertujuan untuk membangun kerja tim dalam sebuah organisasi dengan menilai kapasitas serta kinerja organisasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan evaluasi tersebut adalah supaya dapat meraih dampak positif seperti yang diharapkan dalam sebuah organisasi, diantaranya adalah suatu kesuksesan dalam mencapai misi organisasi melalui program yang telah dibuat dan disepakati bersama. Kegiatan OCPAT yang diselenggarakan oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender bersama dengan KAPAL turut menghadirkan beberapa peserta dari anggota sekolah perempuan, mereka berkesempatan berpendapat juga mengutarakan apa saja pengalaman serta manfaat yang diraih dalam program sekolah perempuan (MAMPU, 2016)

Dalam setiap langkahnya, KAPAL banyak sekali dibantu dengan kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan gender atau yang sering disebut MAMPU. Berbagai sekolah perempuan yang didirikan pun didampingi fasilitator langsung dari kedua belah pihak. Dalam upaya pemberdayaan perempuan serta membela hak perempuan, Kemitraan Australia-Indonesia bukan hanya membantu dari segi penyediaan fasilitator, tetapi juga kerap membuka ruang diskusi, memberi pelatihan, membantu menjalankan advokasi juga sebagai penyuntik dana kepada KAPAL Perempuan. MAMPU sebagai salah satu mitra kerja dari Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan banyak membantu dalam menjalankan berbagai program.

Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan juga sebagai salah satu mitra dalam mewujudkan berdirinya beberapa sekolah perempuan bersama KAPAL. Selain itu juga keduanya telah bekerjasama dalam berbagai kegiatan seperti mendukung KAPAL untuk tergabung dalam Gerakan Gender Watch untuk Penghapusan Kemiskinan. Kegiatan tersebut merupakan suatu upaya untuk memastikan berbagai program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, berkeadilan gender, serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok marginal dan perempuan miskin. Dalam upaya merespon berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan atau khususnya perempuan miskin maka dalam upayanya KAPAL berusaha memberikan respon untuk mengembangkan “Model Pemantauan Berkeadilan Gender, Inklusif dan Transformatif” dengan strategi Gerakan Pemantauan Bersama atau Gender Watch. Upaya ini didukung oleh Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) yang merupakan inisiatif bersama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, yang bertujuan memperluas akses perempuan miskin di Indonesia kepada layanan dasar dan kehidupan yang lebih baik. Sehingga salah satu dari upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kapasitas masyarakat penerima manfaat khususnya perempuan dengan membangun Sekolah Perempuan. Penguatan kapasitas ini untuk mendorong para perempuan miskin berpartisipasi untuk melakukan pemantauan program perlindungan sosial khususnya Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI).

Tujuan dari dibentuknya sekolah perempuan sendiri adalah untuk menimbulkan pemahaman mengenai konsep gender, membangun kesadaran terhadap hal-hal yang berbentuk ketiadilan bagi perempuan, dapat mewaspadaikan terjadinya tindak kekerasan, serta yang terpenting adalah bagaimana para perempuan dapat mempengaruhi dan memantau proses pembangunan di daerahnya. KAPAL Perempuan meyakini bahwa dengan diberikan amunisi berupa pendidikan dan diberikan sarana berupa sekolah perempuan maka perlahan lahan dapat

meningkatkan mutu juga kesadaran para perempuan terkait hal-hal yang sepatutnya mereka dapatkan sebagai individu manusia. Bukan hanya membangun pengetahuan juga wawasan seseorang bahkan pendidikan yang diajarkan dalam sekolah perempuan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kemanusiaan dalam berempati dan tidak mudah menghakimi, karna pada dasarnya pendidikan itu mencerdaskan.

Sekolah perempuan yang didirikan KAPAL kebanyakan anggotanya adalah ibu ibu, para buruh, ibu rumah tangga seta pekerja rumah tangga. Kepulauan Nusa Tenggara menjadi tempat paling banyak didirikannya sekolah perempuan dikarenakan daerah-daerah bagian timur lebih jarang tersentuh oleh pemerintah, aspirasinya susah terdengar, pendidikannya dan pemahaman pun masih jauh lebih kurang dibandingkan mereka yang berada di kepulauan Jawa. Dengan bergabung ke dalam sekolah perempuan dapat menumbuhkan jiwa solidaritas para anggotanya. Penguatan kepemimpinan perempuan juga lama-lama mulai bangkit. Dengan terus aktif dalam sekolah perempuan secara tidak langsung banyak menyelamatkan para perempuan dari kemiskinan, mengubah cara pandang perempuan juga cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Kini para perempuan yang termarginalkan perlahan sudah bisa menyuarakan hak untuk keadilan mereka, KAPAL hanya menjadi pendorong atau penguat basis mereka. Para ibu ibu anggota sekolah perempuan mulai berani bersuara dengan berbagai bukti, bahkan mereka akan beregerak merujuk kepada kasus yang tengah terjadi dan data yang sudah dipersiapkan. Hal itu menjadi poin tersendiri bahwa tandanya para perempuan yang termarginalkan, atau para perempuan yang dulunya sempat putus sekolah kini paham betul bagaimana langkah-langkah menghadapi kenyataan di lingkungan, bagaimana suara mereka dapat didengar serta ditanggapi bukan hanya menjadi bincangan belaka. Bahkan para perempuan mulai berani hadir berpendapat dalam Musrenbang desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa), karena hasil dari kegiatan tersebut adalah berupa informasi penting juga tanggapan terhadap usulan program atau aspirasi yang disuarakan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri.

Sekolah perempuan dari Institut KAPAL Perempuan juga berda dalam satu barisan oleh Migrant care untuk memerangi trafficking yang sering dialami oleh para perempuan. Dengan cara memeberikan bekal materi dan pendidikan pra pemberangkatan adalah salah satu bentuk dari advokasi untuk para migrant Indonesia yang hendak pergi ke luar negeri baik urusan kerja atau apapun itu. Pendidikan yang diberikan yaitu terkait apa saja yang seharusnya dilikaukan atau dihindari ketika menjadi migrant di negara orang lain agtau apa saja yang dapat

membahayakan mereka bahkan sebelum berangkat ke luar negeri. Penting adanya untuk para calon migrant mengetahui hal tersebut, supaya tidak terjebak kasus perdagangan manusia. Sebenarnya kasus perdagangan manusia sendiri berangajat dari kurangnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat di engaranya sendiri sehingga dia harus mencari kerja di negara orang. Kurangnya pendidikan juga menjadi faktor dalam maraknya kasus perdagangan manusia, mimin pemahaman serta edukasi mengakibatkan para calon migran dapat terjat berbagai kasus. Maka dari itu KAPAL hadir dalam sekolah perempuan untuk memberi materi atau membantu melalui edukasi supaya para migrant minim terjat kasus perdagangan manusia khususnya para perempuan, karena pada dasarnya perempuan lebih sering dan mudah terjat di dalamnya.

### **C. Menanggapi Program Perlindungan Sosial**

Selain mewujudkan sadar pemikiran kritis dan sekolah perempuan, KAPAL juga berupaya untuk para perempuan, kelompok marginal, serta perempuan miskin untuk memperoleh hak berupa program perlindungan sosial yang selama ini tidak sepenuhnya dapat diterima serta dinikmati oleh mereka. Dengan adanya program perlindungan sosial maka hal tersebut sama saja menjadi upaya untuk memerangi segala bentuk kemiskinan serta penderitaan yang banyak dialami oleh masyarakat dalam golongan lemah dan salah satunya adalah para perempuan. Karena pada dasarnya perempuan berada dalam ambang dasar kemiskinan, ditandai dengan banyaknya perempuan yang tidak mendapat pekerjaan, kurangnya keahlian, serta pendidikan yang tidak memadai menjadikan perempuan berada dalam posisi yang rentan tertindas dan sering mengalami ketimpangan. Perlindungan sosial yang termasuk dalam kebijakan publik dapat merujuk kepada berbagai layanan masyarakat, ketetapan atau program yang tengah dikembangkan oleh pemerintah dalam melindungi warganya, khususnya adalah untuk kelompok yang rentan dan termarginalkan atas berbagai macam resiko sosial serta ekonomi yang menjadi beban dalam kehidupan mereka. Salah satu program perlindungan sosial yang diajukan untuk perempuan khususnya ibu-ibu juga anak-anak adalah PKH. Program yang dibuat untuk membantu mengurangi kemiskinan pada era Presiden Jokowi ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia yang masih berada dibawah rata-rata baik dalam sisitem sosial maupun ekonomi. Kemudian ada juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) merupakan suatu program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, di dalam pelaksanaan PNPM juga terdapat salah satu kegiatan SPP atau Simpan Pinjam Perempuan.

PKH atau Program Keluarga Harapan adalah program dari Kementerian Sosial berupa bantuan untuk masyarakat paling miskin dalam mengentas kemiskinan di Indonesia dengan cara memberi bantuan tunai sekitar Rp.600 ribu hingga Rp.2 juta/tahun yang akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali, tetapi untuk mendapatkan semua itu ada beberapa syarat yang harus ditempuh terlebih dahulu. Sasaran dari PKH adalah diantaranya, ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Untuk anak-anak yang bersekolah, syaratnya adalah harus mengisi kehadiran 80% dalam sekolah, dan peserta PKH ibu hamil harus mengisi kehadiran 80% pemeriksaan di posyandu. Selain itu yang seringkali terjadi adalah, uang bantuan dari PKH tidak tepat sasaran atau bahkan tidak sampai pada sasaran yaitu masyarakat miskin dengan tanggungan anak bersekolah SD, SMP, Balita dan ibu hamil. Bahkan untuk mendapatkan manfaat bantuan sosial para perempuan dipaksa untuk terus hamil agar Program Keluarga Harapan yang dirancang pemerintah ini dapat dinikmati terus terusan namun dengan menghalalkan segala cara. Seharusnya dengan adanya PKH sedikit banyak dapat membantu perempuan keluar dari masalah kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Namun ternyata seringkali mereka tidak mendapat yang seharusnya.

Tabel 4.1 Persentase Kepala Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Penerima PKH menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT, 2014

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin KRT	
	Perempuan	Laki-laki
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	1.42	1.84
Perdesaan	2.58	3.39
Perkotaan + Perdesaan	1.98	2.62

Sumber: BPS RI - Susenas, 2014

oleh BPS RI- Susenas dalam Profil Perempuan Indonesia 2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa Persentase kepala rumah tangga perempuan berada di 1.98 persen. Sedangkan kepala rumah tangga perempuan yang menerima PKH di pedesaan jauh lebih tinggi dibanding kepala rumah tangga perempuan penerima PKH di perkotaan,



dengan angka 2,58 persen di pedesaan dan 1,42 persen di pedesaan. Namun jika dilihat lebih dalam, persentase kepala rumah tangga laki-laki penerima PKH jauh lebih tinggi dibanding kepala rumah tangga perempuan, baik di perkotaan maupun di pedesaan yaitu berada di angka 2.62 persen (KEMENPPPA, 2015).

Program perlindungan sosial semestinya dapat lebih memudahkan sasarannya untuk memutus rantai kemiskinan, namun pada kenyataannya program perlindungan sosial yang ditawarkan pemerintah pun malah menyusahkan. Dengan berbagai syarat yang diharuskan yaitu anak sekolah mengisi kehadiran 80% di sekolah dan ibu hamil harus mengisi kehadiran 80% pemeriksaan di posyandu adalah syarat yang secara tidak langsung sangat memberatkan bagi para penerima manfaat PKH. Masalahnya syarat kehadiran 80% bagi anak sekolah dengan status masyarakat miskin ini justru menjadi beban, karena kebanyakan jarak tempuh antara rumah dengan sekolah sangat jauh dan seringkali transportasi atau akomodasi untuk menempuh perjalanan tidak ada. Terlebih lagi, kebanyakan anak sekolah dalam status masyarakat miskin juga lebih memilih membantu orangtuanya bekerja baik yang sedang sakit atau terpaksa menggantikan posisi orangtua mereka. Sama halnya dengan masalah yang dialami oleh ibu-ibu hamil yang harus mengisi 80% kehadiran pemeriksaan di posyandu. Perempuan yang disematkan statusnya sebagai ibu rumah tangga atau pekerja perempuan, harus disibukkan dengan berbagai urusan rumah dan anak atau urusan pekerjaan yang mana apabila mereka tidak bekerja maka mereka tidak akan makan. Dalam aturannya, jika penerima manfaat tidak dapat memenuhi syarat tersebut maka bantuan akan dialihkan untuk peserta lain. Persyaratan yang sangat berat ini menutup kesempatan bagi masyarakat miskin untuk dapat menerima manfaat dari PKH.

Menanggapi permasalahan tersebut, dengan menanamkan sadar pemikiran kritis dan sekolah perempuan ini KAPAL berusaha untuk dapat membantu menggerakkan kesadaran para ibu-ibu untuk memahami bagaimana cara kerja program perlindungan sosial, serta menumbuhkan tingkat kesadaran mereka bahwa selama ini hak yang seharusnya dapat mereka gunakan tidak disalah gunakan. Rendahnya partisipasi serta kesadaran dalam kepemimpinan oleh perempuan menjadi salah satu alasan kurangnya mereka dalam merespon program-program perlindungan sosial. Aspirasi para perempuan miskin seringkali tidak ditampung dan mereka hanya dianggap sebagai kelompok sasaran dalam penerima program sosial. Sebagai kelompok yang menerima manfaat, sangat disesalkan apabila perempuan tidak dilengkapi dengan berbagai instrumen partisipasi atau yang paling minim yaitu diberikan ruang bagi perempuan untuk berpendapat mengenai program pemerintah, baik itu memantau, menilai keberlangsungannya, serta memastikan apakah program perlindungan sosial yang dibuat ini

sudah tepat sasaran dan diterima dengan benar oleh para perempuan miskin dan kelompok marginal lainnya atau belum. Dengan menumpuhkan rasa partisipasi dan sifat kepemimpinan terhadap perempuan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena hal itu akan membantu berjalannya program tersebut terlaksana sesuai dengan yang tujuan yang telah dibuat, selain itu juga pemerintah dapat terbantu dalam mengawasi program yang telah mereka buat dan laksanakan supaya sesuai dengan yang telah mereka targetkan.

Dengan menumbuhkan kesadaran kritis juga mendapatkan berbagai arahan dari sekolah perempuan maka para ibu-ibu atau perempuan miskin sedikit mulai berani mengaspirasikan hal yang dianggap tidak benar serta mulai memobilisasi masa atau perempuan lain yang selama ini terjebak dalam kondisi kurang beruntung akibat dimanfaatkan demi mendapatkan bantuan sosial. Sehingga tujuan utama yang sesungguhnya dari pendirian sekolah perempuan serta menumbuhkan pemikiran kritis adalah bukan membantu para perempuan untuk melakukan advokasi, melainkan mendorong atau memberi amunisi terkait upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk menentang ketidakadilan dengan cara bergerak dan melakukan advokasi mandiri. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberanian para perempuan serta menumbuhkan sifat kepemimpinan, sehingga apabila suatu saat terdapat masalah yang serupa lagi para perempuan dapat langsung bergerak tanpa harus menunggu komando dari pihak lain. Hingga hari ini para perempuan anggota sekolah perempuan dari KAPAL Perempuan sebagai kelompok para penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan juga terus diarahkan untuk selalu mengevaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan bagaimana semestinya mekanisme program tersebut dijalankan.

Selain itu, dalam penelitiannya KAPAL mendapatkan temuan dari hasil audit melalui AGBK (audit gender berbasis kelompok) bahwa banyak terjadi ketimpangan terhadap para perempuan khususnya di Desa Pijot, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Banyak terjadi pungutan liar, pemalsuan KTP, serta dana dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang biasa disebut dengan SPP susah diakses untuk perempuan miskin bahkan SPP diakses oleh kelompok sosial menengah keatas dan jelas hal tersebut menjadikan program perlindungan sosial tidak tepat sasaran. Banyak persyaratan yang menyulitkan, dana tidak dapat langsung dicairkan, serta pinjaman dana yang seharusnya dapat dijadikan untuk modal usaha hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain melakukan AGBK di daerah Lombok, KAPAL juga melakukannya di 15 desa/kelurahan di 4 provinsi yaitu NTT, NTB, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Program AGBK ini bertujuan untuk melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan kelompok perempuan miskin sebagai penerima manfaat dari program-program

penanggulangan kemiskinan pemerintah khususnya untuk program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan supaya dapat melakukan model evaluasi bersama dengan perspektif serta analisis gender. Audit yang dilaksanakan terdiri dari beberapa Tim Auditor Komunitas dan diantaranya adalah perempuan miskin yang berperan sebagai penerima bantuan dari kegiatan SPP dan non SPP, kemudian ada juga Fasilitator Daerah dan diantaranya terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil termasuk didalamnya Media, Akademisi, LSM dan Tokoh masyarakat.

Menjadikan perempuan miskin untuk terlibat dalam Auditor Komunitas bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi dan kepemimpinan mereka supaya ikut andil dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan KAPAL supaya perempuan miskin atau termarginalkan dapat tumbuh mandiri menggerakkan roda advokasinya sendiri tanpa harus menunggu banyak dorongan dari luar. Dengan begini para perempuan dapat memperkuat akses mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan menyetarakan hak-hak asasi mereka yang selama ini timpang diterima. Terlebih lagi para perempuan yang tergabung dalam Auditor Komunitas ini juga turut aktif serta terlibat dalam kegiatan desa seperti Musrenbang atau biasa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Banyak kemajuan signifikan yang dilakukan oleh mereka, diantaranya adalah keberanian untuk tampil di depan umum sebagai pembicara dalam berbagai forum desa maupun kecamatan, kabupaten atau bahkan sampai tingkat nasional.

Proses Audit Gender Berbasis Komunitas menggunakan metode yang manual dalam panduan pelaksanaannya. Metode untuk melakukan penggalian data dalam tingkatan desa menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang merupakan suatu metode dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan yang menjadikan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan sebagai titik tumpu (Pratiwi, 2007). Dengan penggalian data menggunakan PRA dapat menghasilkan suatu data alternatif mengenai keadaan kemiskinan khususnya pada perempuan dan hasil audit dari program SPP. Dengan hasil berupa data alternatif ini maka akan banyak membantu pemerintah dalam pembaharuan data-data khususnya data terpilah dan data ini dapat mengisi kesenjangan alat-alat monitoring dan evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan baik dari tingkatan desa hingga nasional.

Hasil Audit gender Berbasis Komunitas dari KAPAL menyatakan bahwa pemerintah lokal hingga nasional dapat melakukan perbaikan kebijakan dan penganggaran mereka serta dapat memastikan bahwa program yang telah dibuat dapat benar-benar jatuh tepat sasaran menjangkau orang miskin, perempuan miskin dan orang-orang yang termarginalkan. Terlebih

lagi memastikan bahwa para kelompok miskin serta perempuan miskin di dalamnya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ataupun program penanggulangan msikin. Upaya dari hasil AGBK kepada pemerintah untuk menyelaraskan program perlindungan sosial demi memerangi kemiskinan dapat ditunjukkan melalui berbagai perbaikan kebijakan serta penganggaran yang kemudian dibuatlah Peraturan Bupati Kabupaten Maros No. 65 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 10 Tahun 2014 tentang “Partisipasi Perempuan Penerima Manfaat dalam Evaluasi Gender Berbasis Komunitas Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah”. Institut KAPAL Perempuan melalui program AGBK juga telah mereplikasi ke dalam program gender watch, yaitu program pemantauan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menanggapi program perlindungan sosial dikhususkan kepada program Jaminan Kesehatan Nasional.

## **KESIMPULAN**

Dalam upaya membangun kesejahteraan hidup yang merata antara perempuan dan laki-laki perlu adanya membangun responsif gender melalui pendidikan alternatif. Atas dasar permasalahan yang tengah dihadapi oleh para perempuan Indonesia seperti, pendidikan rendah yang diterima oleh perempuan yang kemudian merambat ke banyak aspek lain seperti, kemiskinan, angka buta aksara dan pernikahan dibawah umur. Selain itu faktor gender menjadikan akses perempuan di dalam dunia pendidikan sangatlah rendah. Pendidikan alternatif dikatakan penting karena kurikulum di Indonesia yang masih bias gender bahkan hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan para perempuan terus mengalami kerugian dengan berbagai gambaran serta stereotip yang melekat dalam masyarakat.

Selain mewujudkan sadar pemikiran kritis dan sekolah perempuan, KAPAL juga berupaya untuk para perempuan, kelompok marginal, serta perempuan miskin untuk memperoleh hak berupa program perlindungan sosial sebagai akses pemutus rantai kemiskinan yang selama ini tidak sepenuhnya dapat diterima serta dinikmati oleh mereka, program tersebut adalah PKH dan SPP. Namun sayangnya, program perlindungan sosial seringkali menyusahakan dengan berbagai syarat yang harus ditempuh, dan tidak banyak membantu perempuan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Melalui Audit Gender Berbasis Komunitas KAPAL mendorong para perempuan untuk aktif dalam berbagai pembuatan keputusan. Dengan menumbuhkan rasa partisipasi dan sifat kepemimpinan terhadap perempuan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut akan membantu berjalannya

program perlindungan sosial dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah dibuat, selain itu juga pemerintah dapat terbantu dalam mengawasi program yang telah mereka buat dan laksanakan supaya sesuai dengan yang telah mereka targetkan. Hasil Audit gender Berbasis Komunitas dari KAPAL menyatakan bahwa pemerintah lokal hingga nasional dapat melakukan perbaikan kebijakan dan penganggaran mereka serta dapat memastikan bahwa program yang telah dibuat dapat benar benar jatuh tepat sasaran menjangkau orang miskin, perempuan miskin dan orang-orang yang termarginalkan. Terlebih lagi memastikan bahwa para kelompok miskin serta perempuan miskin di dalamnya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ataupun program penanggulangan miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2014). Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Huungan Internasional*, 11.
- Dhina. (2018, September 26). *Peluncuran Sekolah Perempuan Wilayah Replikasi Kabupaten Gresik*. Retrieved from MAMPU Web Site: <http://www.mampu.or.id>
- Handayani, Y. (2016). Perempuan dan Hak Asasi Manusia. *RechtsVinding Online*, 1.
- Institut KAPAL Perempuan. (n.d.). *Sekolah Perempuan Institut KAPAL Perempuan*. Retrieved from Institut KAPAL Perempuan Web Site: <http://kapalperempuan.org>
- Jurnal Perempuan. (2005). *Pendidikan Alternatif untuk Perempuan*. Retrieved from Jurnal Perempuan Web Site: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)
- KAPAL Perempuan. (n.d.). *Sejarah KAPAL Perempuan*. Retrieved Oktober 15, 2018, from KAPAL Perempuan Web Site: <http://kapalperempuan.org>
- KEMENPPPA. (2015). *Profil Perempuan Indonesia 2015*. Retrieved from KEMENPPPA Web Site: <https://www.kemenpppa.go.id>
- Lestari, W. B. (2017, Oktober 24). *Pemunahan Kepentingan Gender Melalui Sekolah Perempuan di Desa Kesamben Kulon, Wringinanom, Kabupaten Gresik*. Retrieved from Repository Unair Web Site: [repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id)
- Lurence. (2014). Feminism, women's movements and women in movement. *Interfce Journal*, 5-6.
- MAMPU. (2016, September 13). *MoU Gender Watch KAPAL Perempuan dan YAO dengan Pemkab Kupang, NTT*. Retrieved Oktober 16, 2018, from MAMPU Web Site: <http://mampu.or.id>

- Mas'ood, M. (1994). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. In M. Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (p. 169). Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Muchtar, Y., & Missiyah. (2016, Desember 27). *Pelatihan untuk Menumbuhkan dan Meningkatkan Sensitifitas Keadilan Gender*. Retrieved from Kapal Perempuan Web Site: <http://kapalperempuan.org>
- Muthoharoh, I. (2008). *Pendidikan Kritis dan Pemberdayaan Masyarakat*. Retrieved from Digilib UIN Web Site: [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)
- OHCHR. (n.d.). *Universal Declaration of Human Right*. Retrieved Oktober 14, 2018, from OHCHR Web Site: <https://www.ohchr.org>
- Ronodirjo, R. F., & Sjahid, A. (n.d.). *Pnduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif Pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP)*. Retrieved Mei 22, 2018, from Unicef Web Site: <https://www.unicef.org>
- UN Women. (n.d.). *About UN Women*. Retrieved Oktober 22, 2018, from UN Women Web Site: <http://www.unwomen.org>
- Valentana, S. R. (2015). Mmbumikan Instrumen HAM Internsional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 7.